

Ekonomi Indonesia dari Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar

FAROUK ABDULLAH ALWYNI¹

Kajian terkait ekonomi dan keuangan Islam mulai berkembang sekitar 3-4 dekade belakangan ini. Sejauh ini penerapan dari kajian terkait ekonomi Islam masih terbatas di wilayah keuangan dan perbankan. Padahal ketika kita berbicara persoalan ekonomi maka tidak akan bisa dilepaskan dari isu-isu terkait kebijakan dan ekonomi politik.

Untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi, sebuah negara juga memerlukan kapasitas untuk berhadapan dengan faktor-faktor yang bersifat bukan keuangan dan ekonomi tetapi berdampak besar bagi keuangan dan ekonomi.

Di antara faktor-faktor di atas adalah stabilitas sosial politik, berfungsi-nya 'good governance' di pemerintahan, penegakan hukum, regulasi yang tidak menyulitkan dan tumpang tindih, birokrasi yang melayani, jaringan pengaman sosial, pelayanan kesehatan yang baik, dan juga sistem pendidikan yang baik. Bahkan, pada dasarnya, hal-hal ini dinyatakan sebagai dasar utama bagi berfungsi-nya sistem *free market* yang baik (Bower et al., 2011).

Maka ketika kita ingin menjadikan ekonomi Islam sebagai sebuah alternatif, sebagai sebuah sistem yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat mengubah kondisi sebuah negara, maka pertama-tama yang kita perlu ketahui adalah apakah tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri? Serta masyarakat dan negara yang seperti apakah yang kita ingin lihat ketika kita menyatakan bahwa ekonomi Islam itu telah berhasil diimplementasikan?

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan di-atas, maka pembahasan ekonomi Islam juga akan memasuki dimensi terkait penyelenggaraan negara, sehubungan dengan hal ini maka kajian ekonomi Islam juga akan membahas hal-hal terkait dengan isu-isu ekonomi politik, ekonomi pembangunan, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal.

Sebelum kita membahas lebih jauh lagi dimensi-dimensi yang terkait dengan kajian ekonomi Islam dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, maka pertama-tama jika kita ingin mengevaluasi ekonomi Indonesia berdasarkan perspektif ekonomi Islam, paling tidak kita akan perlu memahami obyektif dari sistem ekonomi Islam.

Obyektif Ekonomi Islam

Dalam konteks diatas maka obyektif dari ekonomi Islam adalah terkait dengan obyektif dari diturunkan-nya Islam itu sendiri yakni sebagai *Rahmat bagi Sekalian Alam* (QS, 21:107). Satu cara penting untuk merealisasikan Islam sebagai *Rahmat bagi Sekalian Alam* menurut Chapra (2008) adalah dengan mendorong terjadinya *falah* atau kesejahteraan dari segenap manusia terlepas dari ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, dan kebangsaan.

¹ Farouk A. Alwyni adalah alumnus *Perbanas Institute* - Jakarta (S-1), *New York University* - USA (S-2), dan *University of Birmingham* - UK (S-2). Mantan Profesional Senior di-Kantor Pusat *Islamic Development Bank* Jeddah, Saudi Arabia dan Direksi, Bank Muamalat Indonesia. Kini *Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED)* dan juga mengajar di Program MM *Perbanas Institute* dan FE Universitas Indonesia.

Menurut Chapra (2008) pula kata *falah* dan turunannya digunakan 40x didalam al-Qur'an. Sedangkan kata yang lain, *fawz*, yang merupakan sinonim dari *falah* telah digunakan 29x bersama turunannya. Pentingnya *falah* di dalam *Islamic worldview* juga terlihat di mana kata ini merupakan satu kata yang dikumandangkan oleh para *muazzin* lima kali sehari.

Perbedaan mendasar antara konsep ekonomi Islam dan konvensional dalam memandang kesejahteraan adalah Islam tidak sekedar melihat kesejahteraan dari perspektif materi, tetapi juga yang bersifat spiritual dan kebutuhan non-material.

Kebutuhan-kebutuhan non-material ini diantaranya adalah '*mental peace*' dan '*happiness*,' dimana hal ini akan membutuhkan kebutuhan yang lain seperti '*justice*' dan '*human brotherhood*,' yang akan meminta perlakuan yang '*equal*' diantara individual dimana setiap orang perlu diperlakukan dengan '*dignity*' dan '*respect*,' dan juga pentingnya hasil pembangunan dirasakan secara '*equitable*' (Chapra, 2008).

Selain hal-hal diatas, hal-hal non-material penting lainnya terkait dengan pemenuhan kesejahteraan yang berkelanjutan adalah di-antara-nya: '*spiritual*,' '*moral upliftment*,' '*security of life*,' '*property and honor*,' '*individual freedom*,' '*moral as well as material education*,' '*marriage and proper upbringing of children*,' '*family and social solidarity*,' dan '*minimization of crime and tension*'(Chapra, 2008).

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan di atas dalam berbagai literatur Islam dikenal dengan konsep *Maqasid al-Shari'ah* (*goals of the Shari'ah*). Imam al-Ghazali, seorang pemikir besar Islam abad kelima Hijriah mengklasifikasikan *Maqasid* kedalam lima kategori dengan menyatakan:

"The very objective of the Shari'ah is to promote the well-being of the people, which lies in safeguarding their faith

(din), their self (nafs), their intellect ('aql), their posterity (nasl), and their wealth (mal). Whatever ensures the safeguard of these five serves public interest and is desirable, and whatever hurts them is against public interest and its removal is desirable."

Pemikiran terkait dengan tujuan Syariah diatas juga di-tampil-kan pemikir Islam lainnya yakni Imam Ibn al-Qayyim sebagai berikut ini:

"The basis of the Shari'ah is wisdom and welfare of the people in this world as well as the Hereafter. This welfare lies in complete justice, mercy, well-being and wisdom. Anything that departs from justice to oppression, from mercy to harshness, from welfare to misery and from wisdom to folly, has nothing to do with the Shari'ah."

Melihat obyektif dari Sistem Ekonomi Islam (SEI) yang pada dasarnya bersifat multi-dimensi, maka seperti yang disebutkan diatas peran Negara akan dibutuhkan terkait dengan aplikasi kebijakan pembangunan ekonomi yang ada, termasuk didalamnya - tetapi tidak terbatas- reformasi birokrasi, penegakan hukum, kebijakan fiskal dan moneter.

Dalam hal ini, sistem keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, dan segala macam institusi pendukungnya yang bersifat *non-economy* dan *non-financial* akan diarahkan untuk terwujudnya "*socio-economic objectives*" dari Sistem Ekonomi Islam.

Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam

Terkait dengan hal di atas maka evaluasi ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam akan perlu melihat capaian-capaian pembangunan selama ini seperti pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang diantaranya adalah makanan dan minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini akan terkait dengan

kajian batas garis kemiskinan khusus-nya yang terkait dengan *Multi-Poverty Index (MPI)* (Todaro & Smith, 2011).

Hal-hal lain yang bisa dikaji dalam mengevaluasi ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam diantaranya adalah persoalan perpajakan dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Negara (APBN), pembangunan infrastruktur, dan kebijakan moneter. Kita mulai pembahasan ini dengan kajian terkait batas garis kemiskinan.

Batas Garis Kemiskinan

Sebagaimana dibahas di atas, ekonomi Islam menekankan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks Indonesia sekarang, jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di-desa dan kota berdasarkan laporan *Biro Pusat Statistik* (September 2013) adalah sebesar 28.55 juta atau 11.47% dari seluruh penduduk.

Penghitungan garis kemiskinan yang digunakan berdasarkan nilai absolut untuk rata-rata penduduk di desa dan kota adalah Rp. 292,951/kapita/bulan. Sedangkan untuk rata-rata penduduk di-daerah perkotaan dan desa masing-masing adalah sebesar Rp. 308,826/kapita/bulan dan Rp. 275,779/kapita/bulan.

Berdasarkan ‘*common sense*’ standar hidup layak, maka jumlah batas garis kemiskinan yang ada diatas adalah terlalu kecil. Seseorang tentunya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan perhasilan per kapita/bulan seperti tersebut diatas.

Penggunaan batas garis kemiskinan yang ada di-Indonesia diatas ini pada dasarnya adalah masih jauh di-bawah standar internasional batas garis kemiskinan yang di-tetap-kan oleh World Bank yakni USD 2/ kapita/bulan, atau dengan nilai tukar rupiah sekitar USD 1 = IDR 12,000 (26 Juni 2014), maka garis kemiskinan yang ditetapkan menjadi Rp. 720,000/kapita/bulan.

Jika ukuran internasional di atas digunakan, diperkirakan akan terjadi kenaikan signifikan dari jumlah penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Lebih dari itu, jika pendekatan kesejahteraan dari perspektif ekonomi Islam di-gunakan, yang meliputi hal-hal material dan non-material, maka jika dikuantifikasi besar kemungkinan nilai absolutnya bahkan akan melebihi ukuran kemiskinan berdasarkan standard internasional. Hal ini berarti bahwa dari pendekatan ekonomi Islam, kemiskinan di-Indonesia tentunya akan masih sangat besar.

Perpajakan & APBN

Terkait isu perpajakan, ada PROs-CONs diantara para *fuqaha* mengenai pengenaan pajak dalam SEI, tetapi terlepas dari PROs-CONs yang ada, para *fuqaha* yang mendukung pengenaan pajak oleh Negara menyatakan bahwa dukungan hanya diberikan kepada “sistim perpajakan yang adil” yang sesuai dengan semangat Islam.

Sistim perpajakan di-anggap ‘adil’ menurut para *fuqaha* jika memenuhi tiga kriteria:

- a) Pajak di-kenakan hanya untuk membiayai apa yang di-anggap “*absolutely necessary*” dalam rangka merealisasikan “*maqasid*”;
- b) Beban pajak harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar dan didistribukan secara ‘*equitable*’ diantara yang mampu membayarnya;
- c) Pendapatan dari pajak harus digunakan secara hati-hati sesuai dengan maksud mereka dikumpulkan.

Sistim perpajakan yang tidak memenuhi kriteria-kriteria di-atas dideklarasikan sebagai ‘*oppressive*’ dan sepakat untuk dikecam. Sehubungan dengan hal diatas

bagaimanakah dengan sistim perpajakan di Indonesia sekarang ini ? Apakah dapat memenuhi kriteria *adildiatas*?

Persoalan terkait dengan isu perpajakan di-Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan sering dinyatakan bahwa penerimaan Indonesia dari perpajakan atau yang dikenal dengan *tax to GDP ratio* adalah masih dibawah rata-rata negara-negara maju.

Salah satu isu yang sering tampil terkait dengan isu perpajakan dari sisi penerimaan ini adalah mengenai kolusi antara petugas pajak dan perusahaan besar pembayar pajak, dimana banyak petugas pajak yang tertangkap karena bersama-sama dengan wajib pajak besar melakukan penggelapan pajak. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penerimaan pajak yang dianggap masih kecil dibandingkan dengan produk domestik bruto negara.

Kolusi antara petugas dan pembayar pajak dalam kasus di-atas dalam perspektif SEI hendaknya tidak hanya dilihat dari perspektif pelanggaran, tetapi pertamanya perlu di-lihat apakah aturan mengenai perpajakan yang ada sudah benar-benar bersifat 'fair', kompetitif, dan tidak terlalu memberatkan. Pajak yang terlalu besar dan memberatkan akan selalu membuka peluang kolusi karena akan dapat dimanfaatkan oleh para oknum petugas pajak. Perspektif baru untuk lebih meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan justru adalah dengan menerapkan sistim perpajakan yang rendah dan/atau kompetitif, dimana hal ini justru akan memperkecil kemungkinan terjadinya kolusi karena pajak yang rendah justru akan dengan sendirinya menutup peluang kolusi itu sendiri, dan dampaknya adalah memperbesar kemungkinan penerimaan negara dari perpajakan itu sendiri.

Disamping itu kondisi dimana sebagian besar dari Anggaran Negara Indonesia dewasa ini digunakan untuk

keperluan belanja rutin yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, yang berdasarkan APBN 2013 mencapai 38.2% melebihi pengeluaran untuk subsidi sebesar 27.5%, menunjukkan bahwa pengeluaran untuk birokrasi merupakan komponen pengeluaran terbesar negara.

Pengeluaran yang sangat besar untuk birokrasi jika tidak diikuti dengan terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani menunjukkan pemborosan yang besar dari penerimaan negara dalam bentuk pajak. Kondisi birokrasi dewasa ini yang cenderung korup dan tidak efisien adalah sangat tidak sesuai dengan visi ekonomi Islam yang menuntut peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Mata Uang yang Stabil

Chapra (1986) melihat bahwa kestabilan mata uang adalah salah satu tujuan penting dalam ekonomi Islam mengingat penekanan Islam terhadap keadilan dan kejujuran dalam perdagangan. Erosi yang signifikan dari nilai satu mata uang dapat diartikan sebagai satu bentuk korupsi mengingat dampak dari erosi mata uang ini terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Terkait hal diatas dalam konteks mata uang rupiah, selama tahun 2013 nilai mata uang rupiah telah kehilangan lebih dari 20%, rupiah dalam perjalanan-nya tercatat sebagai mata uang yang sangat '*vulnerable*' terhadap '*external shock*'.

Penurunan nilai rupiah secara terus menerus pada dasarnya akan berdampak terhadap jumlah penduduk miskin dalam perspektif internasional yang menggunakan denominasi dollar dalam menentukan batas garis kemiskinan, di-samping itu hal tersebut juga akan lebih memberatkan dalam hal pembayaran hutang dalam bentuk mata uang asing.

Dari uraian di atas, kondisi rupiah

yang ada saat ini adalah masih jauh dari apa yang diharapkan untuk sebuah mata uang dalam perspektif ekonomi Islam.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak adalah bagian penting dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif pemenuhan obyektif *Syariah* akselerasi pembangunan infrastruktur secara riil melingkupi antara lain (Chapra, 1992):

- ❑ Infrastruktur desa dan pengembangan pertanian;
- ❑ Perumahan untuk masyarakat miskin dengan layanan publik dan sanitasi yang baik;
- ❑ Jaringan transportasi publik yang memadai;
- ❑ Sistem pendidikan yang membangun karakter; serta pembangunan pusat-pusat pelatihan;
- ❑ Pembangunan sistem kesehatan yang merata, mulai dari jaringan rumah sakit dan klinik, kontrol terhadap penyakit yang epidemik, penyediaan air bersih, layanan 'sanitary', dan pemberantasan 'malnutrisi'.

Dalam konteks Indonesia sekarang persoalan infrastruktur adalah merupakan isu utama yang sering di-angkat dan bahkan menjadi isu politik penting. Hal-hal penting diatas dewasa ini juga belum terealisasi secara baik, pada kenyataannya tantangan-tantangan pembangunan diatas tidak sekedar dihadapi oleh masyarakat pedesaan, bahkan masyarakat diperkotaan pun belum secara merata memiliki hal-hal dasar diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan masih terjadi 'gap' antara kondisi infrastruktur dasar Indonesia sekarang ini dengan apa yang di-visikan oleh

sebuah sistem ekonomi Islam.

Faktor-faktor Non-Ekonomi & Keuangan yang Berpengaruh Terhadap Ekonomi & Keuangan

Dalam sistem ekonomi Islam beberapa hal yang bukan hal-hal terkait langsung dengan ekonomi dan keuangan tetapi menjadi pilar-pilar penting dari dalam sebuah sistem ekonomi dan keuangan perlu berfungsi secara baik dan optimal. Hal-hal ini seperti yang disinggung diatas diantaranya adalah penegakan hukum, birokrasi yang efisien dan melayani, serta pemerintahan dimana korupsi dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam berbagai index internasional yang memberikan gambaran mengenai lingkungan regulasi dan birokrasi Indonesia, yang diantaranya adalah *ease of doing business index*, *corruption perception index*, dan *The Global Competitiveness Index* terlihat bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki terkait dengan faktor-faktor non-ekonomi dan keuangan Indonesia tetapi berpengaruh terhadap ekonomi dan keuangan. Ranking Indonesia pada umumnya adalah masih di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kondisi diatas tentunya menunjukkan bahwa standard birokrasi dan lingkungan regulasi yang ada di-Indonesia masih dibawah standard yang diinginkan dalam sebuah sistem ekonomi Islam.

Kebijakan Moneter

Perubahan yang lebih fundamental kedepannya adalah terkait dengan kebijakan moneter, yang tentunya dalam kerangka ekonomi Islam kondisi yang ada sekarang ini akan memerlukan perubahan mendasar.

Tetapi perubahan sistem moneter sekarang ini menuju sistem moneter tanpa bunga akan memerlukan peletakkan fondasi ekonomi yang lebih baik dan kuat yang tercermin di-antara-nya dengan penciptaan ekonomi yang lebih merata, sistem perpajakan yang adil, stabilitas mata uang, penggunaan

anggaran negara yang lebih efisien, serta birokrasi dan lingkungan regulasi yang bersih, melayani dan efisien.

Kesimpulan

Dari uraian diatas terlihat bahwa dari perspektif ekonomi Islam masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam perekonomian Indonesia dewasa ini. Beberapa kerangka aplikasi ekonomi Islam diatas adalah beberapa hal yang mungkin dilakukan dalam mengevaluasi ekonomi Indonesia dari kaca mata ekonomi Islam.

Penegakan sistim ekonomi Islam dalam sebuah negara seperti Indonesia pada hakekatnya adalah terciptanya sistim ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Syariah*. Bentuk konkrit dari sistim ekonomi Islam dalam tataran aplikatif pada dasarnya akan mempunyai similaritas dengan hal-hal positif yang telah diterapkan di-negara-negara maju, mengingat semangat universalitas Islam itu sendiri.

Tetapi tentunya ekonomi Islam akan mempunyai kekhasan tersendiri karena akan juga mempertimbangkan aspek *halal* dan *haram* dalam sebuah perekonomian. Disamping itu, kemajuan ekonomi yang diharapkan adalah bukan sekedar kemajuan ekonomi secara material, tetapi juga kemajuan ekonomi yang mempunyai penekanan terhadap aspek-aspek Tauhid, keadilan, etika, dan kemanusiaan sebagaimana obyektif dari *Syariah* itu sendiri (*Maqasid al-Shariah*).

Referensi

Biro Pusat Statistik, *Tabel Garis Kemiskinan, September 2013*.

Bower, Joseph L., Herman B. Leonard, and Lynn S. Paine. 2011. *Capitalism at Risk: Rethinking the Role of Business*. Massachusetts, USA: Harvard Business Review Press.

Chapra, M. Umer, "The Islamic Vision of

Development in the Light of Maqasid al-Shariah," *Occasional Paper Series 15 (London and Washington: International Institute of Islamic Thought, 2008)*.

Chapra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1992)*.

Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary System (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1986)*.

Corruption Perception Index, <http://www.transparency.org>.

Ease of Doing Business Index, <http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ>.

The Global Competitiveness Index 2013-14, <http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness>.

Todaro, Michael P., Stephen C. Smith. 2011. *Economic Development (11th edition)*. Essex, UK: Pearson.